



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : **I**
Rapat Ke : **5**
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Selasa, 1 September 2015**
W a k t u : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna – Nusantara II Lt. 3
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM : Wakil Ketua DPR RI**
Didampingi
Dr. Agus Hermanto : Wakil Ketua DPR RI
- A c a r a : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
2. Laporan BURT DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019.
- Sekretaris Rapat : Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI
Didampingi
1. Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
2. Drs. Helmizar
Kepala Biro Persidangan
3. Dra. Mitra Anindyarina.
Kepala Bagian Persidangan Paripurna
- Hadir Anggota : 435 Dari 556 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka Pukul 11.05 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak **Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, MM**, dihadiri oleh 435 Orang dari 556 Orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah:
 - 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
 - 2) Laporan BURT DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019.
3. Rapat Paripurna menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi IV DPR RI dengan nomor LG/101/Kom.IV/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, Perihal Penyampaian RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk diagendakan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI terdekat. Selanjutnya untuk surat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Kesimpulan

1. Rapat Paripurna Menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Pemerintah ada beberapa Kementerian yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Opini Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) antara lain :
 - a. Kementerian ESDM Tahun 2013 WTP, Tahun 2014 adalah WDP;
 - b. Kementerian Sosial Tahun 2013 WTP, Tahun 2014 adalah WDP;
 - c. Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tidak Menyatakan Pendapat;
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 WDP dan Tahun 2014 Tidak Menyatakan Pendapat;
 - e. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2013 WTP, Tahun 2014 WDP; dan
 - f. Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 dan Tahun 2014 WDP.

Sedangkan khusus untuk lembaga DPR sudah ke 6 (enam) kali menerima status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sehingga menjadi catatan kita bersama-sama dan menjadi apresiasi untuk kita tingkatkan lebih lanjut dalam kaitan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas publik dari APBN yang digunakan.

3. Rapat Paripurna Menyetujui Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019.

C. Penutup

Rapat ditutup Pukul 12.05 WIB.

Jakarta, 1 September 2015

KETUA RAPAT



Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, MM



**Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke – 5
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016
Selasa, 1 September 2015**

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
INDAH KURNIA A-189/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JATIM I	<p>Ada dua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, khususnya untuk wakil dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan yang merupakan mitra kerja kami di Komisi XI. Saya sebagai Anggota Komisi XI ingin menyampaikan 2 (dua) hal.</p> <p>Yang Pertama adalah : terkait dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2013-2014, dimana saat itu Bapak Menteri Keuangan saat ini Bapak Bambang Brodjonegoro ada diposisi yang berbeda, yaitu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di tahun 2013 dan kemudian di tahun 2014 juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan saat ini beliau mendapatkan kesempatan untuk berada diposisi tertinggi yaitu sebagai Menteri Keuangan dan masih mendapatkan predikat WDP. Untuk itu Pimpinan kami berharap untuk di tahun 2015 ini nanti Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran akan bekerja dengan ekstra effort untuk bisa mendapatkan predikat yang lebih baik yaitu wajar tanpa pengecualian khususnya dalam hal penyerapan anggaran dan efektivitas dari penggunaan anggaran itu sendiri.</p> <p>Yang Kedua, pada kesempatan kali ini, kami berharap jajaran yang ada di Menteri Keuangan khususnya untuk <i>revenue center</i> yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang merupakan tulang punggung negara lebih mendapatkan perhatian khusus dalam artian mendapatkan <i>reward and punishment, stick and carrot</i> untuk setiap keberhasilan dan kegagalannya. Dan kemudian lebih meningkatkan dalam hal layanan dan pengawasan yang berdampak kepada hal-hal yang baik bagi seluruh stakeholders, baik itu Pemerintah selaku regulator, pelaku usaha dan pelaku industri serta untuk pekerja dan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka boleh bersama-sama bekerja, bergerak aktif, profesional dan proporsional untuk membina dan meningkatkan loyalitas para pembayar pajak dan pembayar cukai, sehingga mereka boleh meningkatkan kepatuhan dan loyalitas sebagai sumber penerimaan negara, itu saja Pimpinan dari saya, terima kasih.</p>	<p>KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Bu Indah Kurnia dari Fraksi PDI Perjuangan, ini sangat penting buat kita semua.</p>

Jakarta, 1 September 2015
 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,



Drs. HELMIZAR
 NIP. 196407191991031001